

BAB I

PENDAHULUAN

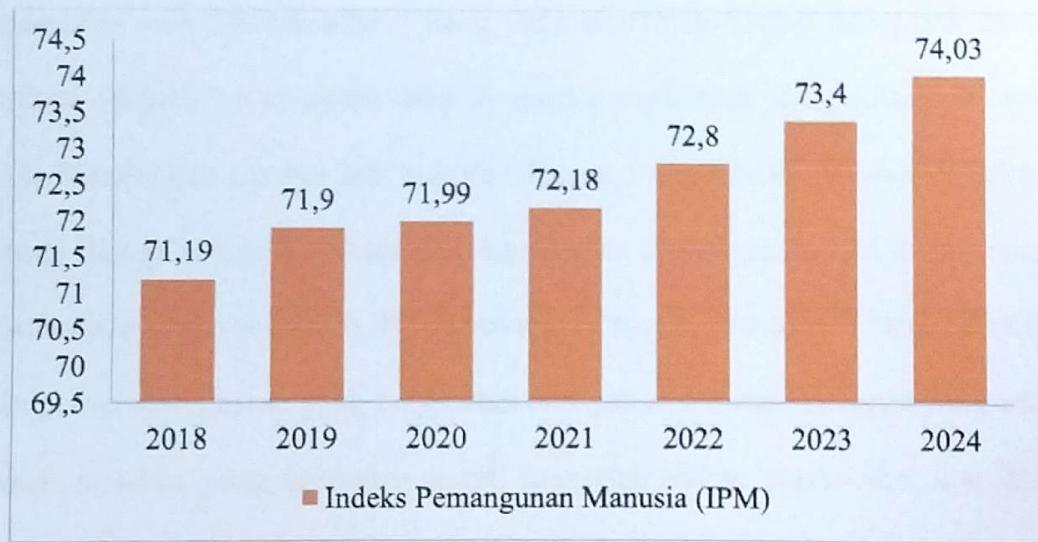
1.1 Latar Belakang Penelitian

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990, *United Nations Development* (UNDP) membangun indeks ini untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimiliki dalam pembangunan. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran ril per kapita yang disesuaikan (BPS, 2020).

Manusia merupakan kekayaan bangsa, apabila masyarakat sudah menikmati umur panjang serta sehat dan pengetahuan maka produktif yang akan di dapat oleh wilayah atau negara sehingga masyarakat bisa mendapatkan standar hidup layak. Suatu wilayah atau negara apabila mempunyai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi maka kesuksesan pembangunan manusia. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan menambah produksi. Timbulnya perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dan dorongan kepada pertambahan dalam produksi nasional dan tingkat kegiatan

ekonomi. Faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang sangat penting yaitu sumber daya manusia (human resource). Manusialah yang paling aktif dalam pertumbuhan ekonomi sehingga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi perlu adanya efisiensi dalam tenaga kerja (Arifin & Fadllan, 2021)

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur untuk menilai tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya, Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota melalui IPM pemerintah Aceh melihat perkembangan sektor kesehatan, pendidikan dan pendapatan yang merupakan tiga aspek penting dalam pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Aceh dapat dilihat melalui Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Aceh 2018 – 2024 :



Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh 2018 – 2024 (Point)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh diolah (2025)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh terus mengalami tren peningkatan pada tahun 2018 IPM provinsi Aceh berada 71,19 point dan terus meningkat sampai tahun 2024 mencapai 74,03 point peningkatan ini menunjukan kemajuan yang baik dalam peningkatan harapan hidup, kualitas pendidikan dan standar hidup masyarakat Aceh.

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk efektif dalam memanfaatkan aset lokal, menciptakan lapangan kerja, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat (Nuarisa, 2013). Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dituntut mampu dalam mengelola potensi daerah berupa SDA (sumber daya alam). SDM serta pengoptimalan potensi-potensi sumber daya keuangannya (Monica & Sa'roni, 2022) .

Salah satu sumber keuangan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah uang yang diperoleh daerah dari pajak daerah, retribusi (seperti biaya parkir atau layanan pasar), hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, dan sumber sah lainnya. Tujuan PAD adalah memberi kebebasan kepada daerah untuk mengatur dan membiayai urusannya sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. PAD merupakan sumber pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari galian potensi keuangan yang ada di daerah tersebut yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan dalam proses pemerataan pembangunan bagi masyarakat (Widia Sofyan, 2023). Berikut gambar 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota Provinsi Aceh 2018 – 2024 :



Gambar 1. 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh 2018 – 2024 (Miliar Rupiah)

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DPJK) diolah (2025)

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa PAD Kab/Kota di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, PAD yang paling tinggi yaitu pada tahun 2024 dengan nilai 6.237,51 Miliar Rupiah dan nilai yang paling rendah yaitu pada tahun 2021 dengan nilai 5.378,32 Miliar Rupiah. Pada tahun 2021 PAD menurun drastis disebabkan pada masa itu Indonesia khususnya Provinsi Aceh terdampak Pandemi Covid – 19.

Selain PAD, Dana Bagi Hasil (DBH) menurut Menteri Keuangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi adalah proses dimana pemerintah pusat menyediakan dana kepada pemerintah daerah agar mereka dapat terus menyediakan layanan publik. Desentralisasi berupaya memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dan

memberikan wewenang yang lebih nyata kepada pemersintah. Agar daerah dapat memiliki kreativitas, inovasi, dan kemandirian untuk setiap daerah maka diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dalam Undang-Undang No.33 Tahun (2004), Dana Bagi Hasil adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berikan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan angka persentase dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut teori fiskal desentralisasi, transfer dana dari pusat ke daerah seperti dana bagi hasil dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam menyediakan layanan publik yang lebih baik sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Oates, (1972) . DBH diterapkan dengan tujuan mengoreksi kesenjangan hierarki antara pemerintah pusat dan daerah, mengakui peran vital wilayah penghasil pendapatan sebagai pemangku kepentingan utama dalam peningkatan pembangunan daerah, terutama dalam menyediakan infrastruktur, fasilitas, serta meningkatkan mutu layanan kepada publik (Bakhrudin et al., 2021). Seringkali dana bagi hasil dimanfaatkan untuk keperluan penyelenggaraan otonomi daerah. Berbeda dengan dana bantuan lainnya, dana bagi hasil merupakan dana yang menjadi hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara yang dihasilkan daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) dapat memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal dan peningkatan layanan publik yang akhirnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ikut meningkat. Dalam konteks Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal melalui

optimalisasi layanan publik, pengembangan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang baik. Dana Bagi Hasil (DBH) juga berpengaruh terhadap Belanja Modal dana yang di gunakan untuk membangun infrastruktur yang strategis, belanja modal yang produktif tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi daerah tapi juga menciptakan lapangan kerja baru (Pangaribuan,2020). DBH berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Pemanfaatan DBH secara efektif memungkinkan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang merupakan komponen utama IPM, sehingga secara langsung meningkatkan pembangunan manusia di tingkat daerah. Berikut gambar 1.3 Dana Bagi Hasil (DBH) Kab/Kota Provinsi Aceh 2018 – 2024 :



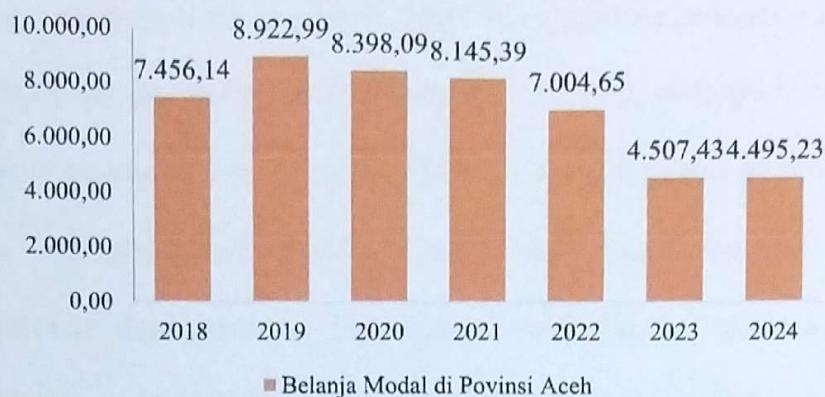
Gambar 1. 3 Dana Bagi Hasil Provinsi Aceh 2018 – 2024 (Miliar Rupiah)

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DPJK) diolah (2025)

Dari gambar 1.3 menujukan bahwa dalam 7 tahun terakhir DBH mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. DBH Provinsi Aceh tahun 2018 sampai 2024 yang paling tinggi yaitu pada tahun 2023 dengan nilai 1.449,98 Miliar

Rupiah dan yang paling rendah yaitu pada tahun 2021 dengan nilai 1.032,11 Miliar Rupiah. Dapat di lihat bahwa dana bagi hasil Provinsi Aceh masih belum stabil dalam pengelolaan dana bagi hasil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah belanja modal, yaitu pengeluaran pemerintah daerah untuk investasi pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sarana transportasi. Belanja modal ini menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan adanya kewenangan pengelolaan dana yang jelas dan tanggung jawab yang diatur dalam undang - undang ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan belanja modal guna mendorong pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Aset tetap dipakai sebagai aktivitas sehari-hari pada unit kerja yang digunakan masyarakat serta tercatat dalam aset pemerintah dan tujuannya bukan untuk dijual. Belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja tanah, belanja bangunan dan gedung, irigasi, jalan dan jaringan, belanja aset lainnya. Namun pengelolaan belanja modal memerlukan perencanaan yang matang dan transparansi yang tinggi. Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam belanja modal akan sangat bergantung dengan perencanaan yang baik, pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang akuntabel. Berikut gambar 1.4 Belanja Modal di Provinsi Aceh 2018- 2024 :



**Gambar 1. 4 Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi Aceh 2018 – 2024
(Miliar Rupiah)**

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DPJK) diolah (2025)

Dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa belanja modal di Provinsi Aceh dalam 6 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Namun jumlah belanja modal yang paling tinggi yaitu pada tahun 2019 dengan nilai 8.922,99 Miliar Rupiah dan nilai yang paling rendah yaitu pada tahun 2024 dengan nilai 4.495,23 Miliar Rupiah .

Selain itu salah satu faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu Jumlah Tenaga kerja karna jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan nasional. Jumlah Tenaga kerja tidak hanya dilihat dari kuantitas yaitu jumlahnya saja tetapi dilihat pula dari sudut kualitas yaitu mutu seperti tingkat pendidikan dan kesehatannya. Tenaga kerja jika digabungkan dengan mesin dan peralatan maka dapat menghasilkan output yang lebih besar jumlahnya, karena produktivitas menjadi lebih tinggi dan kualitas juga menjadi lebih baik. Mill mengemukakan Tenaga kerja produktif dapat menciptakan kesejahteraan dan akumulasi modal. Laju akumulasi modal merupakan fungsi dari bagian angkatan kerja yang dipekerjakan secara produktif. Laba yang diterima dengan mempekerjakan tenaga kerja tidak produktif hanya sebagai pengalihan

pendapatan, tenaga kerja tidak produktif tidak menghasilkan kesejahteraan atau pendapatan (Prayitno & Yustie, 2020). Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Todaro (2011) menyatakan investasi dalam pembinaan sumber daya manusia juga dapat meningkatkan kualitas modal manusia ,sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan tingginya jumlah pengangguran dan jumlah kemiskinan menjadi meningkat apabila tidak didukung dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai bagi penduduk usia kerja. Apabila jumlah lapangan kerja semakin banyak akan diikuti dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap, maka akan berpotensi menurunkan jumlah penduduk miskin yang berakibat pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Berikut grafik jumlah Tenaga Kerja di Kab/Kota Provinsi Aceh 2018 – 2024 :



Gambar 1. 5 Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Aceh 2018 – 2024 (Jiwa)

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) 2025

Dari grafik tersebut dapat di lihat bahwa di Provinsi Aceh mengalami kenaikan setiap tahunnya dan tahun yang paling tinggi yaitu pada tahun 2023 menuju angka 2.604.452 Jiwa. Banyaknya jumlah tenaga kerja yang ada di provinsi Aceh. Maka dari itu pemerintah provinsi aceh harus menciptakan lapangan kerja baru, lapangan kerja harus di barengi dengan kualitas tenaga kerja yang baik yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian yang mempengaruhi faktor-faktor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah banyak dilakukan, baik pada tingkat nasional maupun provinsi. Namun, masih terdapat beberapa kesenjangan (gap) yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya. Pertama, sebagian besar studi terdahulu berfokus pada agregat nasional atau provinsi, sehingga kurang memberikan gambaran yang spesifik pada tingkat kabupaten/kota, khususnya di Provinsi Aceh yang memiliki karakteristik sosial dan fiskal yang khas. Kedua, banyak penelitian hanya menggunakan data hingga tahun 2019 atau sebelum pandemi COVID-19, sehingga belum mencerminkan dampak krisis terhadap pembangunan manusia. Akan tetapi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi selama dan setelah pandemi sangat berpengaruh terhadap pencapaian IPM di berbagai daerah. Ketiga, sejumlah penelitian sebelumnya hanya mengkaji pengaruh faktor-faktor fiskal seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), atau belanja modal secara terpisah, tanpa mengikutsertakan aspek ketenagakerjaan, padahal jumlah tenaga kerja merupakan elemen penting dalam mendorong kualitas hidup masyarakat dan pembangunan manusia secara keseluruhan.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menawarkan sejumlah kebaruan (novelty). Pertama, penelitian ini menggabungkan analisis antara faktor-faktor fiskal PAD, DBH, belanja modal dan faktor ketenagakerjaan jumlah tenaga kerja secara simultan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap IPM. Pendekatan ini memberikan gambaran secara menyeluruh dalam memahami pembangunan manusia dari sisi pemberdayaan daerah maupun potensi sumber daya manusia. Kedua, cakupan wilayah yang difokuskan secara khusus pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh menjadi hal yang unik, mengingat kondisi Aceh yang memiliki status otonomi khusus serta tantangan pembangunan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Ketiga, penelitian ini menggunakan data panel selama periode 2018 hingga 2024, yang mencakup masa sebelum, saat, dan setelah pandemi. Hal ini menjadikan hasil penelitian lebih relevan dengan konteks terkini serta dapat digunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berbasis data di tingkat daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh ?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh ?
3. Bagaimana Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh ?
4. Bagaimana Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas maka, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
4. Mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pengembangan dan kajian mengenai ilmu ekonomi:

1. Menambah referensi untuk akademik mengenai kebijakan fiskal dan ekonomi daerah. Dengan diteliti judul diatas maka mahasiswa, dosen, serta peneliti lain dapat memiliki referensi tambahan mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Penelitian ini memperkuat teori terkait Indeks Pembangunan Manusia dengan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, belanja modal, dan jumlah tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan bagi pemerintah agar dapat memberikan informasi mengenai efektivitas dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, belanja modal dan jumlah tenaga kerja dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan penting dalam menyusun kebijakan keuangan daerah dan rencana pembangunan.

Memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mendukung dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, yang dapat membantu dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi dan ekspansi usaha.